

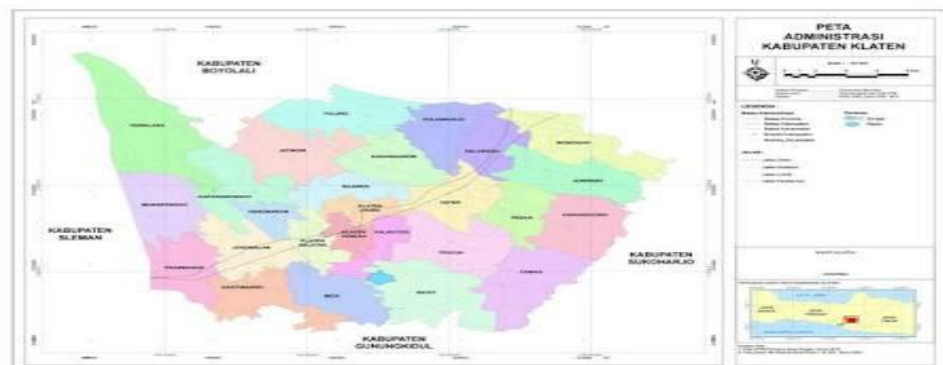
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah dan Lembaga

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Klaten merupakan bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana terdapat 35 kabupaten serta 391 desa, terletak pada antara $7^{\circ}32'19''$ Lintang selatan sampai $7^{\circ}48'33''$ Lintang Selatan dan antara $110^{\circ}26'14''$ Bujur Timur sampai $110^{\circ}47'57''$ Bujur Timur dengan mempunyai luas wilayah $655,56 \text{ Km}^2$ atau seluas 2,014% dari luas provinsi Jawa Tengah, disamping itu Klaten memiliki wilayah yang strategis karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga memiliki nilai yang strategis serta memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan wilayah pada Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kabupaten Klaten

2. Profil Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2000 mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah maka dibentuklah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten, namun seiring perkembangan zaman serta permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, undang-undang serta peraturan yang sudah tidak selaras dengan kondisi yang dihadapi maka diperlukan penggantian undang undang dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten yang digunakan sebagai peraturan pendamping.

Dengan pertimbangan kedua peraturan tersebut maka pada tanggal 15 Oktober 2016 menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disamping itu penetapan peraturan daerah tersebut mengakibatkan nama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten dirubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten.

Dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah serta pelaksanaan fungsinya BPKD Kabupaten Klaten mengupayakan

optimalisasi sumber pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pemanfaatan segenap potensi dan sumber daya sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pemerintahan dengan arah pengelolaan dan pemanfaatan dilakukan secara terarah dan terpadu demi mencapai tujuan dari BPKD Kabupaten Klaten. BPKD Kabupaten Klaten memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. BPKD memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang keuangan
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKD memiliki fungsi yaitu:
 - a. Perumusan kebijakan bidang keuangan
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan
 - d. Pembinaan penyelenggaraan teknis fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Visi dan Misi BPKD
 - a. Visi BPKD Kabupaten Klaten

Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan daerah dan aset daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.
 - b. Misi BPKD Kabupaten Klaten

- 1) Pemantapan pengelolaan pendapatan, keuangan daerah, dan pengelolaan aset daerah (PPKAD) serta tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Menciptakan keterpaduan pengelolaan PPKAD dimulai dari perumusan kebijakan pelaksanaan program kegiatan hingga pelaporan dan evaluasi.
- 3) Penyempurnaan peraturan-peraturan di Bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Aset Daerah.
- 4) Pemeberdayaan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pengelolaan pendapatan, keuangan daerah, dan pengelolaan aset daerah.
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola PPKAD dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Tujuan dan Sasaran BPKD Kabupaten Klaten

a. Tujuan

- 1) Mewujudkan Sistem Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Daerah, dan Aset Daerah (PPKAD) yang aplikabel dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menyiapkan berbagai peraturan pengelolaan PPKAD sesuai kondisi daerah dan peraturan yang ada.
- 3) Mewujudkan aparat pengelolaan PPKAD yang profesional.

- 4) Mewujudkan sarana dan prasarana serta data bidang pendapatan, keuangan daerah, dan aset daerah yang memadai kepada masyarakat.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan.

b. Sasaran

- 1) Sistem Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah yang aplikabel dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Peraturan-peraturan daerah di Bidang Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang lengkap dan dinamis.
- 3) Sumber daya manusia pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah profesional dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 4) Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang memadai.
- 5) Terciptanya pelayanan prima baik keada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun masyarakat pada umumnya.

5. Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Klaten

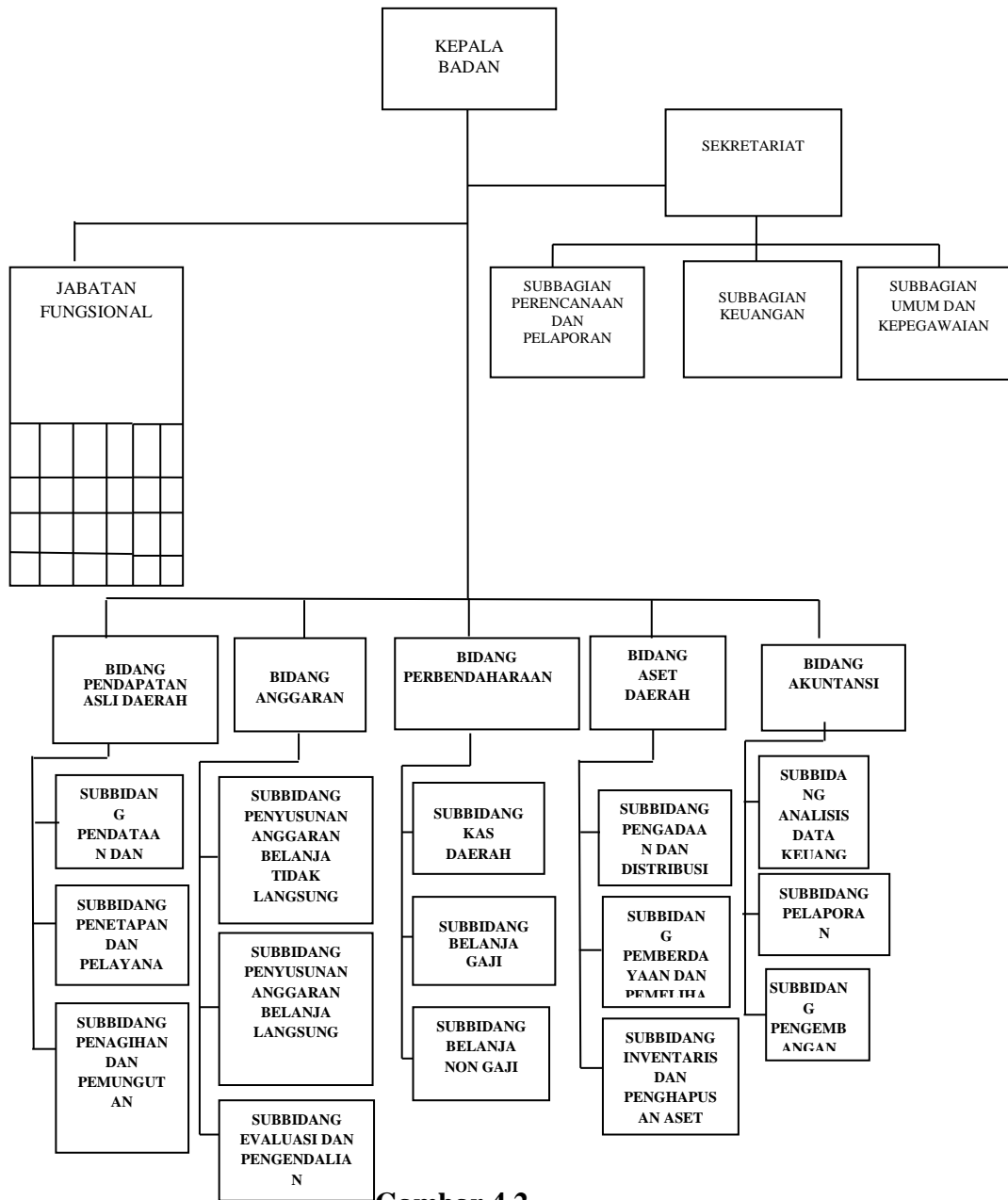
Organisasi BPKD Kabupaten Klaten diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, kemudian Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 diundangkan struktur organisasi BPKD Kabupaten Klaten diatur dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Adapun struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
 - 1) Sub bidang perencanaan dan pelapor
 - 2) Sub bidang keuangan
 - 3) Sub bidang umum dan kepegawaian
- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah
 - 1) sub bidang pendataan dan penilaian
 - 2) sub bidang penetapan dan pelayanan
 - 3) sub bidang penagihan dan pemungutan
- d. Bidang Anggaran
 - 1) Sub bidang penyusun anggaran belanja tidak langsung
 - 2) Sub bidang penyusun anggaran belanja langsung
 - 3) Sub bidang evaluasi dan pengendalian
- e. Bidang Perbendaharaan
 - 1) Sub bidang kas daerah
 - 2) Sub bidang belanja gaji
 - 3) Sub bidang belanja non gaji
- f. Bidang Aset
 - 1) Sub bidang pengadaan dan distribusi
 - 2) Sub bidang pemberdayaan dan pemeliharaan
 - 3) Sub bidang inventarisasi dan penghapusan aset

g. Bidang Akuntansi

- 1) Sub bidang analisis data keuangan
- 2) Sub bidang pelaporan
- 3) Sub bidang pengembangan akuntansi



Gambar 4.2

Bagan Organisasi BPKD Kabupaten Klaten

B. Analisis Data dan Pembahasan

Penelitian analisis *flypaper effect* pada Kabupaten Klaten ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui kemandirian serta ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten terhadap transfer pusat yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan melihat kinerja keuangannya tahun 2016-2018. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dan rasio keuangan daerah. Adapun rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, derajat kontribusi BUMD, derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran tahun 2016-2018. Hasil dari penelitian analisis *flypaper effect* pada Kabupaten Klaten berdasarkan kinerja keuangan tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018

Belanja Daerah merupakan pengeluaran pemerintah pada urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan lainnya dimana penanganannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, tujuan dari belanja daerah yaitu untuk memenuhi kewajiban daerah pada bidang pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak dalam pengembangan sosial. Oleh

karena itu untuk melihat perkembangan belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Klaten 2016-2018

Tahun	Belanja Daerah	BD Tahun Sebelumnya	Perkembangan
2016	2.282.330.771.499	2.077.785.996.047	9,84%
2017	2.481.861.743.842	2.282.330.771.499	8,74%
2018	2.611.007.499.826	2.481.861.743.842	5,20%

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Klaten tahun 2016-2018 selalu mengalami peningkatan, walaupun peningkatan tersebut bersifat fluktuatif. Perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 9,84% sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten klaten pada bidang pembangunan dan perekonomian.

2. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah selain itu untuk menilai suatu daerah mandiri atau tidak serta kemampuan dan peningkatan kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah daerah tersebut, jika Pendapatan Asli Daerah besar maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut sudah mengoptimalkan potensi sumber-sumber yang ada, selain itu juga dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak bergantung pada transfer pusat dari pemerintah pusat. Menurut Asari dan Suaradana

(2018) Pendapatan Asli Daerah merupakan perwujudan desentralisasi dimana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola sumber penerimaan yang berasal dari sumber-sumber daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sehingga untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah kabupaten klaten tahun 2016-2018 dapat diketahui dari Tabel 4.2

Tabel 4.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	PAD Tahun Sebelumnya	Pertumbuhan
2016	224.197.408.481	190.622.670.128	17,61%
2017	371.718.439.306	224.197.408.481	65,80%
2018	395.884.244.135	371.718.439.306	6,50%

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa realisasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, hal ini dapat dikarenakan terjadi peningkatan pada penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

3. Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018.

Transfer pusat merupakan salah satu wewenang pemerintah pusat dalam menunjang otonomi daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), transfer ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pada kenyataannya

pemerintah daerah cenderung bergantung pada transfer pusat ini dan tidak mengoptimalkan pendapatannya serta dapat menurunkan pendapatan pajak daerah, oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan transfer pusat Kabupaten Klaten dapat dilihat dari Tabel 4.3

Tabel 4.3
Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2018

Tahun	Transfer Pusat	Transfer Pusat Tahun Sebelumnya	Perkembangan
2016	1.573.615.108.481	1.279.990.558.283	22,94%
2017	1.624.715.625.119	1.573.615.108.481	3,25%
2018	1.652.127.767.661	1.624.715.625.119	1,69%

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan transfer dari pusat mengalami penurunan, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu 22,94% Peningkatan ini terjadi karena terjadi peningkatan dari penerimaan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

4. Adapun hasil dari perhitungan rasio keuangan

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai kepentingan pemerintah, pembangunan dan pelayanannya sendiri dengan pendapatan asli daerahnya yang diperoleh dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat. Rasio ini dapat ditunjukkan

besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan sumber dana lain seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil serta pinjaman, pada Kabupaten Klaten tidak terdapat pinjaman karena dalam pemenuhannya, Kabupaten Klaten juga menggunakan pembiayaan daerah, rumus rasio kemandirian (Mahmudi, 2011) yang digunakan adalah:

$$\text{Rumus Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 4.4
Tingkat Kemandirian dan Kemampuan
Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Tingkat Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75% 100%	Delegatif

Sumber : Kepmendagri No690.900.327/1996 (dalam Putri&Nurlia, 2017)

Kemandirian keuangan daerah dapat rendah dikarenakan pemerintah daerah dalam pengeluaran belanja daerah lebih besar menggunakan pendapatan transfer pusat yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Kemudian dikarenakan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah serta belum dikelola secara maksimal. Adapun hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Transfer Dari Pusat	Rasio	Pola Hubungan
2016	224.197.408.481	1.716.940.317.124	13,06%	Instruktif
2017	371.718.439.306	1.851.429.599.039	20,08%	Instruktif
2018	395.884.244.135	1.828.029.847.888	21,66%	Instruktif
Rata-Rata			18,26%	Instruktif

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan, rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2016 adalah 13,06% dan menjadi tahun yang terendah, sedangkan rasio kemandirian yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 21,66%, walaupun rasio kemandirian tertinggi namun masih masuk dalam pola instruktif. Hal ini mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masih bergantung kepada pemerintah pusat sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Klaten belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

b. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas digunakan untuk mengetahui keberhasilan tujuan yang telah dicapai dengan melihat perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan target Pendapatan Asli Daerah, jika realisasi mencapai target maka dapat dikatakan

bahwa kinerja keuangan telah efektif. Rumus rasio efektivitas (Mahmudi, 2011) yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.6
Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Presentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber : Mahmudi, 2011

Adapun hasil perhitungan dari rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Perhitungan Rasio Efektivitas Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2018

Tahun	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio	Keterangan
2016	203.699.708.000	224.197.408.481	110,06%	Sangat Efektif
2017	335.512.441.000	371.718.439.306	110,79%	Sangat Efektif
2018	373.770.433.500	395.884.224.135	105,92%	Sangat Efektif
Rata-rata			108,92%	Sangat efektif

Sumber data diolah: 2019

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah sangat efektif dalam mengelola pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Rasio efektivitas pada tahun 2017 adalah 110,79% dan menjadi tahun tertinggi, namun pada tahun 2018 menurun menjadi 105,92% walaupun sudah masuk dalam kategori

yang sangat efektif. Pemerintah daerah harus selalu mengoptimalkan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah sehingga setiap tahun selalu mengalami peningkatan.

c. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi digunakan untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menerima Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Rumus rasio efisiensi (Mahmudi, 2011) yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.8
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi (%)
Sangat Efisien	< 5%
Efisien	5%-10%
Cukup Efisien	11%-20%
Kurang Efisien	21%-30%
Tidak Efisien	> 30%

Sumber : Mahmudi, 2011

Adapun hasil perhitungan dari rasio efisiensi yang diperoleh dari perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah:

Tabel 4.9
Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Kabupaten Klaten

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD	Rasio	Keterangan
2016	224.197.408.481	3.383.000.000	1,51%	Sangat Efisien
2017	371.718.439.306	4.090.700.000	1,10%	Sangat Efisien
2018	395.884.244.135	4.277.270.000	1,08%	Sangat Efisien
Rata-Rata			1,23%	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam pengelolaan pendapatan asli daerahnya sudah sangat efisien hal ini dibuktikan dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 1,23% yang masuk dalam kategori sangat efisien, namun tahun 2016-2018 justru mengalami penurunan dari 1,51% menjadi 1,08%.

d. Rasio Aktivitas

Rasio ini digunakan untuk mengetahui penggunaan dana atas dana alokasi belanja rutin serta belanja pembangunan secara optimal, jika hasil penggunaan dana alokasi semakin tinggi maka pemerintah dalam menyediakan pelayanan masyarakat dengan belanja investasinya semakin kecil. Rumus rasio aktivitas (Mahmudi, 2011) adalah sebagai berikut:

1) Rasio Belanja Rutin terhadap APBD

$$RBR = \frac{\text{Belanja rutin/operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Tabel 4.10
Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2018

Tahun	Belanja Rutin/Operasi	Total APBD	Rasio
2016	2.055.485.308.945	2.282.330.771.499	90,06%
2017	2.106.954.185.967	2.481.861.743.842	84,89%
2018	2.213.168.965.030	2.611.007.499.826	84,76%
Rata-Rata			86,57%

Sumber : Data dioalah, 2019

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil perhitungan rasio aktivitas pemerintah daerah Kabupaten Klaten sebagian besar dananya masih digunakan untuk belanja operasi walaupun dari tahun 2016-2018 selalu mengalami penurunan.

2) Rasio Belanja Modal Terhadap APBD

$$RBR = \frac{\text{Belanja modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Tabel 4.11
Hasil Perhitungan Rasio Belanja Modal Terhadap APBD

Tahun	Belanja Modal	Total APBD	Hasil
2016	220.759.087.283	2.282.330.771.499	9,67%
2017	364.937.481.638	2.481.861.743.842	14,70%
2018	384.574.980.960	2.611.007.499.826	14,73%
Rata-Rata			13,04%

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa hasil perhitungan rasio belanja modal mengalami kenaikan dari tahun 2016-2018, tahun 2016 merupakan tahun terendah yaitu 9,67%, sedangkan pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan sebesar 0,03% sehingga belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun berikutnya, adapun rumus rasio pertumbuhan (Mahmudi, 2011) yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0} \times 100\%$$

Tabel 4.12
Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Klaten

Tahun	Pendapatan Asli Daerah tahun Ini	Pendapatan Asli Daerah Sebelumnya	Rasio Pertumbuhan
2016	224.197.408.481	190.622.670.128	17,61%
2017	371.718.439.306	224.197.408.481	65,80%
2018	395.884.244.135	371.718.439.306	6,50%
Rata-Rata			29,97%

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 4.12 merupakan hasil perhitungan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten yang mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 48,19% menjadi 65,80% sedangkan rasio pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 6,50%, untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya.

f. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan oleh perusahaan daerah untuk mendukung

pendapatan daerah. Rumus derajat kontribusi BUMD (Mahmudi, 2011) yang digunakan adalah:

$$DK \text{ BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 4.13
Hasil Perhitungan Derajat Kontribusi BUMD
Kabupaten Klaten

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	Total Pendapatan	Rasio
2016	9.025.861.668	2.258.604.630.605	39,96%
2017	9.742.870.570	2.581.515.295.917	37,74%
2018	22.811.147.630	2.577.961.130.135	88,49%
Rata-Rata			55,40%

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa kontribusi perusahaan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam mendukung pendapatan daerah mengalami kenaikan walaupun masih belum stabil, kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 37,74%, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Klaten terus berupaya untuk mengoptimalkan kontribusi BUMD sehingga pada tahun 2018 memperoleh kontribusi BUMD yang tertinggi sebesar 88,49%, jika kontribusi BUMD ini dari tahun ke tahun dapat mengalami peningkatan maka dapat memaksimal pendapatan asli daerah, dengan demikian pemerintah daerah akan cenderung mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan trnasfer pusat.

g. Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi menunjukkan tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah, desentralisasi dapat diketahui dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan total daerah. Rumus derajat desentralisasi (Mahmudi, 2010) yang digunakan adalah:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 4.14
Kategori Tingkat Desentraisasi

No	Derajat Desentralisasi	Kategori
1	Sangat baik	>50,00%
2	Baik	40,01%-50,00%
3	Sedang	30,01%-40,00%
4	Cukup	20,01%-30,00%
5	Kurang	10,01%-20,00%
6	Sangat kurang	0-10,00%

Sumber : Mahmudi, 2011

Hasil perhitungan derajat desentralisasi yang diperoleh dari perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Perhitungan Derajat Desentralisasi

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Hasil	Keterangan
2016	224.197.408.481	2.258.604.630.605	9,93%	Sangat Kurang

2017	371.718.439.306	2.581.515.295.917	14,40%	Kurang
2018	395.884.244.135	2.577.961.130.135	15,36%	Kurang
Rata-Rata			13,23%	Kurang

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Klaten mengalami kenaikan kategori dari sangat kurang menjadi kurang, dengan rata-rata 13,23% dan masih termasuk dalam tingkat desentralisasi yang kurang, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya perlu dimaksimalkan kembali. Tingkat desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 14,40%, kemudian tahun 2016 merupakan tahun terendah ditunjukkan dengan hasil derajat desentralisasi sebesar 9,93%.

h. Rasio Ketergantungan

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kontribusi transfer dari pusat terhadap jumlah pendapatan daerah, jika hasil kontribusi transfer dari pusat tinggi maka dapat menunjukkan tingkat ketergantungan, adapun rumus yang digunakan untuk rasio ketergantungan (Mahmudi, 2011) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 4.16
Kategori Tingkat Ketergantungan Daerah

No	Tingkat	Kategori
----	---------	----------

	Ketergantungan	
1	Sangat Tinggi	>50,00%
2	Tinggi	40,01%-50,00%
3	Cukup	30,01%-40,00%
4	Sedang	20,01%-30,00%
5	Rendah	10,01%-20,00%
6	Sangat Rendah	0%-10,00%

Sumber : Mahmudi, 2011

Adapun hasil perhitungan rasio ketergantungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan
Kabupaten Klaten

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan	Rasio	Kategori
2016	1.716.940.317.124	2.258.604.630.605	76,02%	Sangat Tinggi
2017	1.851.429.599.039	2.581.515.295.917	71,72%	Sangat Tinggi
2018	1.828.029.847.888	2.577.961.130.135	70,91%	Sangat Tinggi
Rata-Rata			72,88%	Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah, 2019

Hasil perhitungan rasio ketergantungan menunjukkan bahwa pada tahun 2016 merupakan tahun tertinggi yaitu sebesar 76,02%, ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten setiap tahunnya mengalami penurunan, namun masih masuk dalam kategori sangat tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam memenuhi kebutuhan publiknya masih menggunakan transfer pusat dan belum mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya.

5. Analisis *Flypaper Effect*

Menurut Hariyani (2017) suatu daerah dapat dikatakan mengalami *flypaper effect* jika realisasi pendapatan asli daerahnya lebih rendah daripada realisasi pendapatan transfer pusat.

Tabel 4.18
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pusat

Tahun	Realisasi Transfer Pusat	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2016	1.573.615.108.481	224.197.408.481
2017	1.624.715.625.119	371.718.439.306
2018	1.652.127.767.661	395.884.244.135

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, disamping itu realisasi transfer pusat dari tahun 2016-2018 juga mengalami peningkatan, walaupun keduanya mengalami peningkatan, realisasi Pendapatan Asli Daerah lebih kecil daripada realisasi transfer pusat, selain itu pada rasio kemandirian rata-rata tahun 2016-2018 sebesar 18,26% dengan pola hubungan instruktif, hal ini menunjukkan pemerintah daerah Kabupaten Klaten belum mampu melaksanakan otonomi daerah serta masih sangat bertumpu pada transfer pusat, walaupun pada rata-rata rasio efektivitas pemerintah Kabupaten Klaten menunjukkan 108,92% atau sangat efektif serta pada rata-rata rasio efisiensi juga menunjukkan sangat efisien yaitu 1,23%, namun pada rasio aktivitas pada belanja rutin/operasi terhadap APBD diketahui bahwa sebagian dana kabupaten klaten digunakan untuk membiayai belanja operasi.

Belanja operasi sendiri bersumber dari dana alokasi umum yang pengalokasiannya digunakan untuk belanja pegawai, dengan kata lain kontribusi DAU hanya untuk belanja operasi saja sedangkan pada rasio belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil.

Pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Klaten mengalami peningkatan tetapi masih belum stabil, hal ini juga ditunjukkan pada derajat kontribusi BUMD serta derajat desentralisasi dimana pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Pada rasio ketergantungan menunjukkan bahwa ketergantungan daerah Kabupaten Klaten selalu mengalami penurunan namun masih dalam kategori ketergantungan yang sangat sangat tinggi yaitu dengan rata-rata 72,88% dengan demikian Kabupaten Klaten dapat dikatakan mengalami *flypaper effect*

